

**ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN UPAH TERHADAP
PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR
INDUSTRI PENGOLAHAN DI PROVINSI
SULAWESI SELATAN PERIODE
2012-2016**

SKRIPSI

Oleh
AKBAR FATUR RAHMAN
105710201114



**ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN UPAH TERHADAP
PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR
INDUSTRI PENGOLAHAN DI PROVINSI
SULAWESI SELATAN PERIODE
2012-2016**

SKRIPSI

AKBAR FATUR RAHMAN

105710201114

*Diajukan untuk Memenuhi salah satu syarat Penelitian pada Program
Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah **Analisis Pengaruh Investasi dan Upah Terhadap Peyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016** ini ku persembahkan kepada Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Muhammad Amir dan Ibunda Hj. Jumarni yang selalu memberikan kasih sayang, doannya, dukungan, semangat serta nasehat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga untuk saudaraku tercinta Rahmat Arif Hidayatullah yang selalu memberikan arahan, perhatian dan motivasinya.

MOTTO HIDUP

Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

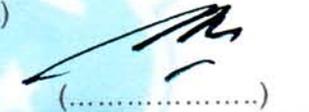
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Akbar Fatur Rahman, Nim : 105710201114, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0008/SK-Y/60201/091004/2018 M. Tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/ 31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1439 H
 31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Ismail Rasulong, SE., MM 
 2. Hj. Naidah, SE., M.Si 
 3. Drs. Sanusi A.M, SE., M.Si 
 4. Faidul Adzim, SE., MSi 



Disahkan oleh,
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
 NBM: 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Pengaruh Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016"
Nama Mahasiswa : Akbar Fatur Rahman
No Stambuk/NIM : 105710201114
Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018.

Makassar, 31 Agustus 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Dr. Buyung Romadhoni, MM
NIDN: 0028087801

Pembimbing II,

Asdar, SE., M.Si
NIDN: 0903039102

Diketahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Unismuh Makassar



Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM : 903 078

Ketua,
Jurusan IESP

Hj. Naidah, SE., M.Si
NBM. 710 561



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akbar Fatur Rahman

Stambuk : 105710201114

Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP)

Dengan Judul : "Analisis Pengaruh Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016"

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2018

Yang membuat Pernyataan,



Akbar Fatur Rahman

Diketahui Oleh :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Unismuh Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078

Ketua,
Jurusan IESP

HJ. Naidah SE.,M.Si
NBM: 710 561

ABSTRAK

AKBAR FATUR RAHMAN, Tahun 2018. Analisis Pengaruh Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016, Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Buyung Romadhoni dan Asdar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2012-2016. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah data publikasi Badan Pusat Statistik berupa data tenaga kerja di sektor industri, investasi, dan upah minimum regional selama tahun 2012-2016. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan SPSS. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, dapat disimpulkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri. Setiap peningkatan investasi sebesar 1 persen akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,04 persen. Upah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya setiap peningkatan dan penurunan upah tidak berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2016.

Kata Kunci : *Investasi, Upah, Tenaga Kerja.*

ABSTRACT

AKBAR FATUR RAHMAN, Year 2018. *Analysis of the Influence of Investment and Wages on Manpower Absorption in the Processing Industry Sector in South Sulawesi Province 2012-2016 Period*, Thesis of Economics and Development Studies Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Buyung Romadhoni and Asdar.

This study aims to determine the effect of investment and wages on employment in the manufacturing industry in South Sulawesi Province in the period 2012-2016. The type of research used in this study is research with a quantitative descriptive approach. The data that is processed is the Central Statistics Agency's publication data in the form of work data in the industrial sector, investment, and wages in the regional minimum for 2012-2016. The analysis technique used in this study is a multiple regression analysis technique using SPSS. Based on the results of multiple regression analysis, it can be concluded that investment has a positive and significant effect on employment in the industrial sector. Every investment increase of 1 percent will increase employment in the manufacturing industry sector in South Sulawesi Province by 0.04 percent. Wages have a positive and insignificant effect on employment. This means that any increase and decrease in wages does not have a significant impact on employment in the manufacturing industry in South Sulawesi Province in 2012-2016.

Keywords: *Investment, Wages, Labor.*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakalah penulis skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016”. (Studi Kasus Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan).

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda **Buyung Romadhoni** dan Kakanda **Asdar** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan ucapan terima kasih yang saya haturkan kepada saudaraku **Rahmat Arif Hidayatullah** yang senang tiasa mendukung dan memberi semangat hingga akhir studi dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak **Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM.**, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak **Ismail Rasulong, SE., MM.**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu **Hj. Naidah, SE., M.Si.**, Selaku ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak **Dr. Buyung Romadhoni, MM.**, Selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan, memotivasi penulis sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak **Asdar, S.E., M.Si.**, Selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan, memotivasi penulis sehingga skripsi selesai dengan baik.
6. Ibu **Hj. Lilly Ibrahim, SE., M.Si.**, Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam menyelesaikan permasalahan pada dunia perkuliahan.
7. Para **Dosen dan Staff** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar atas segala jerih payahnya membimbing penulis selama dibangku perkuliahan.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi IESP angkatan 2014 terkhusus untuk kelas IESP 2 yang menjadi teman untuk belajar, berbagi dan teman curhat dalam proses perkuliahan.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimah kasih atas bantuan dalam terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya penulis mendokan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua yang turut membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini kesempurnaan hanya milik Allah SWT, Olehnya penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan. Akhir kata penulis ucapkan terimah kasih.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khaerat, Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar, Agustus 2018

Akbar Fatur Rahman

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| ABSTRAK | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| A. Tinjauan Teori..... | 8 |
| 1. Konsep Ketenagakerjaan..... | 8 |
| 2. Konsep Tentang Industri..... | 11 |
| 3. Konsep Tentang Investasi | 16 |
| 4. Teori Tentang Upah | 20 |
| B. Tinjauan Empiris | 27 |
| C. Kerangka Konsep..... | 31 |
| D. Hipotesis..... | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |

| | |
|--|-----------|
| A. Jenis Penelitian | 34 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 34 |
| C. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran | 34 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 35 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 35 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 39 |
| A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan | 39 |
| 1. Kondisi Geografis..... | 39 |
| 2. Potensi Sumber Daya..... | 40 |
| 3. Peluang Investasi..... | 44 |
| 4. Kondisi Klimatologi..... | 52 |
| B. Perkembangan Investasi, Upah, dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan | 53 |
| 1. Perkembangan Investasi di Provinsi Sulawesi Selatan | 53 |
| 2. Perkembangan Upah di Provinsi Sulawesi Selatan | 55 |
| 3. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri | 56 |
| C. Hasil Uji Asumsi Klasik | 58 |
| 1. Hasil Uji Normalitas..... | 58 |
| 2. Hasil Uji Multikolinieritas | 59 |
| 3. Hasil Uji Autokorelasi | 60 |
| 4. Hasil Uji Heterokedastisitas | 61 |
| D. Hasil Pengujian Hipotesis | 62 |
| 1. Uji Simultan (Uji-F) | 63 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Uji Koefisien Determinasi (R^2) | 63 |
| 3. Uji Partial (Uji-T) | 64 |
| E. Pembahasan | 66 |
| 1. Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan | 66 |
| 2. Pengaruh Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan | 67 |
| BAB V PENUTUP | 69 |
| A. Kesimpulan..... | 69 |
| B. Saran..... | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 73 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016 | 4 |
| Tabel 4.1 | Perkembangan Investasi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2016 | 54 |
| Tabel 4.2 | Perkembangan Upah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2016 | 56 |
| Tabel 4.3 | Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2016 | 57 |
| Tabel 4.4 | Hasil Uji Multikolinearitas | 60 |
| Tabel 4.5 | Hasil Uji Autokorelasi | 60 |
| Tabel 4.6 | Klasifikasi Nilai DW Untuk Autokorelasi | 61 |
| Tabel 4.7 | Hasil Uji Simultan (Uji-F) | 63 |
| Tabel 4.8 | Hasil Uji Koefisien Determinasi | 64 |
| Tabel 4.9 | Hasil Uji Partial (Uji-T) | 64 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---------------------------|----|
| Gambar 2.1 | Kerangka Pikir Penelitian | 32 |
| Gambar 4.1 | Grafik Norma P-Plot | 59 |
| Gambar 4.2 | Grafik Scatterplot | 62 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara-negara berkembang berkeyakinan bahwa sektor industri mampu mengatasi masalah-masalah perekonomian, dengan asumsi bahwa sektor industri dapat memimpin sektor-sektor perekonomian lainnya menuju pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi hal yang sangat penting, karena ketika berbicara mengenai pembangunan ekonomi, berarti didalamnya terdapat sebuah proses pembangunan yang melibatkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan beberapa perubahan. Perubahan itu antara lain mencakup perubahan struktur ekonomi (dari pertanian ke industri atau jasa) dan perubahan kelembagaan, baik melalui regulasi maupun reformasi kelembagaan itu sendiri (Mudrajad Kuncoro, 2009:54).

Pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan yang erat dengan industri karena hampir semua negara–negara di dunia memajukan sektor industri demi memiliki nilai efisiensi yang tinggi, nilai guna serta menciptakan daya saing tinggi terhadap negara–negara sekitarnya. Namun Indonesia juga tidak mau ketinggalan begitu saja terbukti perkembangan industrialisasi di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat yang dibarengi juga dengan pertumbuhan ekonomi ditambah Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar sekaligus memiliki pasar domestik yang amat besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dengan asumsi bahwa sektor industri dapat memimpin sektor-sektor perekonomian lainnya menuju pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, di Indonesia sektor industri

dipersiapkan agar mampu menjadi penggerak dan memimpin (*the leading sector*) terhadap perkembangan sektor perekonomian lainnya, selain akan mendorong perkembangan industri yang terkait dengan yang lainnya.

Industrialisasi memiliki peran strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi fisik masyarakat melalui perluasan lapangan usaha dan memperluas kesempatan kerja. Pembangunan di sektor industri merupakan bagian dari usaha jangka panjang untuk memperbaiki struktur ekonomi yang tidak seimbang karena bercorak pertanian kearah ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang antara pertanian dan industri (Kemenperin, 2012:7). Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dibutuhkan kerja sama yang baik antar sektor perekonomian. Kerja sama yang baik antar sektor mengakibatkan setiap kegiatan sektor produksi memiliki daya menarik (*backward linkage*) dan daya mendorong (*forward linkage*) terhadap sector lain.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, menurut Todaro (2008:44) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang benar-benar cepat akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan system perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi (Todaro, 2004: 55).

Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari kenaikan GNP (*Gross National Product*) atau GDP (*Gross Domestic Product*), pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi dibutuhkan kerja sama yang baik antar sektor perekonomian. Kerja sama yang baik antar sektor mengakibatkan setiap kegiatan sektor produksi memiliki daya menarik (*backward linkage*) dan daya mendorong (*forward linkage*) terhadap sektor lain. Sektor industri pengolahan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah kontribusi PDB Indonesia terbesar di peroleh dari sektor industri pengolahan dengan kontribusi berasal dari sektor industri pengolahan. Industri pengolahan adalah industri yang strategis. Industri ini dipandang mampu mendorong perekonomian Indonesia yang sedang berkembang. Dengan didukung oleh sumber daya manusia yang melimpah, maka sektor industri pengolahan diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja yang besar.

Provinsi Sulawesi Selatan sendiri sebagai provinsi yang memiliki berbagai potensi pengembangan baik dari segi infrastruktur, potensi pasar, tenaga kerja, dan sumber daya alam telah mengalami pertumbuhan pada

berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari semakin berkembangnya PDRB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2016, sektor terbesar penyumbang PDRB di Sulsel merupakan sektor industri dan pengolahan yang terus meningkat.

Tabel 1.1 menunjukkan gambaran perkembangan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2012-2016.

Tabel 1.1
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012–2016

| No | Tahun | Penyerapan Tenaga Kerja (jiwa) |
|----|--------|--------------------------------|
| 1 | 2012 | 3.351.908 |
| 2 | 2013 | 3.291.280 |
| 3 | 2014 | 3.527.036 |
| 4 | 2015 | 3.620.123 |
| 5 | 2016 | 3.694.712 |
| | Jumlah | 17.485.059 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Tahun 2018.

Pada tabel 1.1 menunjukkan jumlah tenaga kerja yang diserap pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja dari tahun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Angka penyerapan tenaga kerja tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebanyak 3.694.712 jiwa. Hal ini disebabkan karena tahun 2016 lebih tertuju pada investasi dengan keijakan yang diarahkan pada model produksi menggunakan padat karya. Memperbaiki iklim investasi merupakan salah satu tonggak dari strategi pembangunan. Namun, industri yang bersifat padat modal membuat investasi yang ditanamkan cenderung dipergunakan untuk

pembelian modal yang berupa mesin mesin canggih sehingga tidak banyak menggunakan tenaga kerja pada pembelian mesin sehingga berdampak atau menurunkan jumlah penyerapan tenaga kerja pada tahun 2016 pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan adanya peningkatan investasi pada suatu industri, juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan oleh dengan adanya peningkatan investasi maka akan meningkatkan jumlah perusahaan yang ada pada industri tersebut. Peningkatan jumlah perusahaan maka akan meningkatkan jumlah output yang akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau dengan kata lain akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Terdapat hubungan yang negatif antara Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan pengangguran (Mankiw, 2008). Pada skala wilayah yang lebih kecil, total pendapatan dan total pengeluaran pada *output* barang dan jasa disebut sebagai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Perubahan pada PDRB riil dari tahun ke tahun erat kaitannya dengan perubahan tingkat pengangguran peningkatan PDRB dapat menurunkan tingkat pengangguran.

Penyediaan lapangan kerja yang besar diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Perbaikan kualitas sumber daya manusia juga mutlak diperlukan karena merupakan modal pembangunan. Tersedianya tenaga kerja yang besar jika dimanfaatkan, dibina, dan dikerahkan untuk bisa terserap di sektor ini dan menciptakan tenaga kerja yang efektif akan menjadi modal yang besar dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.

Penyerapan tenaga kerja juga tidak terlepas dari peranan pemerintah sebagai penyusun kebijakan yang mendukung terciptanya iklim investasi yang baik, serta strategi-strategi yang dilakukan demi tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan upah minimum provinsi juga sering menjadi alasan bagi pengusaha untuk lebih memilih industri yang padat modal. Stabilitas perekonomian juga diperlukan untuk menjamin perekonomian berjalan dengan lancar.

Permasalahan penyediaan kesempatan kerja di Sulawesi Selatan menjadi penting dengan kondisi penduduk yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pertambahan penduduk membuat jumlah angkatan kerja di Sulawesi Selatan meningkat. Sektor industri yang memiliki nilai tambah cukup besar besar diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih luas.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka penulis pun tertarik untuk menulis proposal yang berjudul "*Analisis Pengaruh Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016*".

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok masalah yang dapat diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah upah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2012-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2012-2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna di dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai bahan studi ilmu pengetahuan bagi mahasiswa agar dapat menambah wawasan mengenai tujuan dari analisa sektor industri pengolahan terhadap tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Bagi lembaga Pendidikan

Sebagai bahan referensi bagi kalangan akademisi dan lembaga pendidikan yang tertarik untuk meneliti masalah sektor industri pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja.

c. Bagi Ilmu pengetahuan

Menambah khazanah keilmuan tentang nilai-nilai pendidikan serta memberi masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsep Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan pada pembentukan tenaga profesional yang mandiri dan beretos kerja produktif. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh yang ditujukan pada peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisiensi, efektif, dan berjiwa wirausaha sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan berusaha.

Berdasarkan BPS, pekerja atau tenaga kerja adalah semua orang yang biasanya bekerja di perusahaan/usaha tersebut, baik berkaitan dengan produksi maupun administrasi. BPS (Badan Pusat Statistik) membagi tenaga kerja (*employed*) atas 3 macam, yaitu tenaga kerja penuh (*full employed*), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas. Sementara Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*under employed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu. Sedangkan Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*unemployed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja 0 > 1 jam per minggu.

Secara praktis pengertian tenaga kerja atau bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batasan umur. Tiap-tiap negara mempunyai batasan umur tertentu bagi setiap tenaga kerja. Tujuan dari penentuan batas umur ini adalah supaya definisi yang diberikan dapat menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Tiap negara memilih batasan umur yang berbeda, karena perbedaan situasi tenaga kerja di masing-masing negara yang berbeda. Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur pada batas usia kerja, dimana batas usia kerja setiap negara berbeda-beda.

Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batasan umur yang masing-masing berbeda untuk setiap negara. Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan yang ditetapkan tanggal 1 Oktober 1998 telah ditentukan bahwa batasan minimal usia seorang tenaga kerja di Indonesia adalah 10 tahun atau lebih. Namun Indonesia tidak menganut batasan maksimum usia seorang tenaga kerja. Pemilihan batasan umur 10 tahun berdasarkan kenyataan bahwa pada umur tersebut sudah banyak penduduk yang bekerja karena sulitnya ekonomi keluarga mereka. Indonesia tidak menganut batas umur maksimal karena Indonesia belum mempunyai jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan di hari tua yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta. Untuk golongan inipun, pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh karena

itu, mereka yang telah mencapai usia pensiun biasanya tetap masih harus bekerja sehingga mereka masih digolongkan sebagai tenaga kerja (Simanjuntak, 2013:273).

Pada dasarnya tenaga kerja dibagi dalam dua kelompok, yaitu Angkatan kerja yaitu tenaga kerja berusia 10 tahun yang selama, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan pekerjaan, dan bukan angkatan kerja yaitu tenaga kerja yang berusia 10 tahun ke atas yang, mengurus rumah tangga, dan sebagainya dan tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari kerja. Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini sering dinamakan *potential labor force* (Simanjuntak,2010:276).

Menurut Handoko (2014 Vol 14) penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Dalam penyerapan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tersebut antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Dalam dunia usaha tidaklah memungkinkan mempengaruhi kondisi tersebut, maka hanyalah pemerintah yang dapat menangani dan mempengaruhi faktor eksternal. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal dan pengeluaran non upah.

Ada perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang diminta atau dalam hal ini tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan atau suatu sektor. Permintaan tenaga kerja adalah keseluruhan hubungan antara berbagai tingkat upah dan jumlah orang yang diminta untuk dipekerjakan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih ditujukan kepada kuantitas atau banyaknya permintaan tenaga kerja pada tingkat upah tertentu (Wahyu R, 2009:38).

Penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor perekonomian. Sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan barang dan jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal. Pertama, terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-masing sektor. Kedua, secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya dalam pendapatan nasional.

Jadi yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di berbagai sektor perekonomian. Tenaga kerja di Indonesia lebih banyak terserap pada sektor informal. Sektor informal akan menjadi pilihan utama pencari kerja karena sektor formal sangat minim menyerap tenaga kerja. Sektor formal biasanya membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang tinggi.

2. Konsep Tentang Industri

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan dan perancangan industri. Pengertian industri juga meliputi semua perusahaan yang mempunyai kegiatan tertentu dalam mengubah secara mekanik atau secara kimia bahan-bahan organik sehingga menjadi hasil baru.

Dari pengertian diatas maka industri mencakup segala kegiatan produksi yang memproses pembuatan bahan-bahan mentah menjadi bahan-bahan setengah jadi maupun barang jadi atau kegiatan yang bisa mengubah keadaan barang dari suatu tingkat tertentu ke tingkat yang lain, kearah peningkatan nilai atau daya guna yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan Menurut Dumairy (2008:104) pengertian industri ada 2, yaitu Industri yang dapat berarti himpunan perusahaan-perusahaan yang sejenis dan Industri yang dapat pula merujuk ke suatu sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Kegiatan pengolahan itu sendiri dapat bersifat maksimal, elektrikal atau bahkan manual.

Industri merupakan suatu kegiatan atau usaha mengolah bahan atau barang agar memiliki nilai yang lebih baik untuk keperluan masyarakat di suatu tempat tertentu. Pada hakekatnya pembangunan industri ditujukan untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh dan seimbang, yaitu struktur

ekonomi dengan titik berat pada industri yang maju dan didukung oleh pertanian yang tangguh. Pembangunan industri secara nyata harus menjadi penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus dapat menjadi penyedia lapangan kerja yang sudah mulai tidak tertampung pada sektor pertanian.

Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

1. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe/tahu, dan industri makanan ringan.
2. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang, Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relatif kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. Misalnya: industri genteng, industri batubata, dan industri pengolahan rotan.
3. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu. Misalnya: industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik.

4. Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan (*fit and profer test*). Misalnya: industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan industri pesawat terbang.

Secara definisi ada beberapa pengertian industri pengolahan seperti yang dikemukakan bintaro, dimana dia menjelaskan bahwa Industri pengolahan ialah setiap usaha yang merupakan unit produksi yang membuat barang untuk kebutuhan masyarakat di suatu tempat tertentu.

Agora (2013:Vol 1. No 3) mengatakan industri dapat dibagi ke dalam industri makro dan industri mikro. Secara mikro, industri adalah kumpulan dari perusahaan yang menghasilkan barang sejenis. Sedangkan secara makro, industri adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah. Salah satu masalah yang dihadapi oleh industri pengolahan yaitu pertumbuhan sektor industri pengolahan selama ini tidak banyak menyumbang perluasan kesempatan kerja, sebagai contoh tenaga kerja yang keluar dari sektor pertanian tidak sepenuhnya mampu ditampung oleh sektor industri.

Sektor industri pengolahan yaitu sektor yang mencakup semua perusahaan atau usaha di bidang industri yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk dalam sektor ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industri dan pekerjaan perakitan (*assembling*) dari suatu industri (Badan

Pusat Statistik, 2010). Industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri dibedakan menjadi industri besar dan sedang serta industri kecil dan rumah tangga. Industri besar adalah industri yang menggunakan mesin tenaga dengan buruh 50 orang keatas, atau industri yang tidak menggunakan mesin tenaga tetapi mempunyai buruh 100 orang keatas. Industri sedang adalah industri yang menggunakan mesin tenaga dengan buruh 5 sampai dengan 49 orang atau industri yang tidak menggunakan mesin tenaga tetapi mempunyai buruh 10 sampai dengan 99 orang. Industri kecil adalah industri yang menggunakan mesin tenaga dengan buruh 1 sampai 4 orang, atau industri yang tidak menggunakan mesin tenaga tetapi mempunyai buruh 1 sampai dengan 9 orang. Kerajinan rumah tangga adalah suatu usaha perubahan/pembentukan suatu barang menjadi barang lain yang nilainya lebih tinggi dan tidak mempergunakan buruh yang dibayar.

Keberadaan suatu industri sangat menentukan sasaran atau tujuan kegiatan industri. Berdasarkan lokasi unit usahanya, industri dapat dibedakan menjadi lima yaitu Pertama, Industri berorientasi pada pasar (*market oriented industry*), dimana industri ini merupakan industri yang didirikan mendekati daerah persebaran konsumen. Kedua, Industri berorientasi pada tenaga kerja (*employment oriented industry*), yaitu industri yang didirikan mendekati daerah pemusatan penduduk, terutama daerah yang memiliki banyak

angkatan kerja tetapi kurang pendidikannya. Ketiga, Industri berorientasi pada pengolahan (*supply oriented industry*), merupakan industri yang didirikan dekat atau di tempat pengolahan. Misalnya: industri semen di Palimanan Cirebon (dekat dengan batu gamping), industri pupuk di Palembang (dekat dengan sumber pospat dan amoniak), dan industri BBM di Balongan Indramayu (dekat dengan kilang minyak). Keempat, Industri berorientasi pada bahan baku, yaitu industri yang didirikan di tempat tersedianya bahan baku. Misalnya: industri konveksi berdekatan dengan industri tekstil, industri pengalengan ikan berdekatan dengan pelabuhan laut, dan industri gula berdekatan lahan tebu. Kelima, Industri yang tidak terikat oleh persyaratan yang lain (*footloose industry*), yaitu industri yang didirikan tidak terikat oleh syarat-syarat di atas. Industri ini dapat didirikan di mana saja, karena bahan baku, tenaga kerja, dan pasarnya sangat luas serta dapat ditemukan di mana saja. Misalnya: industri elektronik, industri otomotif, dan industri transportasi.

3. Konsep Tentang Investasi

Investasi menurut para ekonom memiliki beberapa pengertian. Menurut Tandelin (2010:7), investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Tandelin menambahkan bahwa investasi juga mempelajari dalam mengelola kesejahteraan investor (*investor's wealth*) yang bersifat moneter bukan kesejahteraan rohaniah. Kesejahteraan moneter bisa ditunjukkan oleh penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat ini (*present value*) pendapatan dimasa yang akan datang.

Menurut Muljana (2009:33), investasi merupakan bagian dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya bersifat infrastruktur atau prasarana yaitu bangunan fisik atau lembaga yang memiliki fungsi yang esensial sebagai pembuka peluang dan pendukung kegiatan-kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan lain dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Sedangkan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang umumnya langsung menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan konsumen, baik perorangan, rumah tangga, maupun industri. Investasi merupakan salah satu faktor yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi, karena selain akan mendorong kenaikan output secara signifikan, investasi juga akan meningkatkan permintaan input yang salah satunya adalah tenaga kerja, sehingga akan mempengaruhi pada penyediaan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja pun tinggi, akhirnya kesejahteraan masyarakat tercapai sebagai akibat dari peningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional serta kesempatan kerja adapula penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan yang

terakhir investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi pada umumnya, investasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Investasi pada aset-aset finansial (*financial assets*) yaitu investasi yang dilakukan di pasar uang misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang dan lain-lain.
2. Investasi pada aset-aset riil (*real assets*) yaitu investasi yang dilakukan di pasar modal misalnya berupa saham dan lain-lain. Investasi pada aset-aset riil ini dapat berbentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya.

Menurut Zulgani (2011:27), investasi adalah mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa yang akan datang. Tujuan utama investasi ada dua, yaitu mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak dan tambahan penyediaan modal yang ada. Pembangunan di suatu daerah tidak terlepas dari perkembangan distribusi dan alokasi investasi daerah. Pemisahan jenis investasi dalam melakukan investasi sangat perlu, yaitu antara investasi yang dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah, karena faktor yang mempengaruhi atau menentukan lokasi kedua jenis investasi tersebut berbeda. Pemerintah menyikapi hal ini harus memperhatikan faktor-faktor yang ada, seperti pengembangan suatu daerah tertentu karena alasan politis dan strategis, misalnya daerah perbatasan dan daerah yang mempunyai sejarah serta ciri khusus, sehingga memerlukan perhatian yang khusus juga (Zulgani 2011:27).

Fasilitas modal yang pada umumnya disebut sebagai penanaman modal atau investasi berasal dari dua sumber. Pertama Investasi Asing dimana Investasi asing atau biasa disebut Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu bentuk penghimpunan modal guna menunjang proses pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri.

PMA terdiri atas Investasi portofolio (*portofolio investment*), yakni investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang asional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya. Kedua, yaitu investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*), merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya.

Undang-undang yang mengatur PMA di Indonesia pertama kali ditetapkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian disempurnakan oleh UU No. 11 Tahun 1970 juga mengenai Penanaman Modal Asing. Di dalam UU tersebut terdapat berbagai kemudahan yang dilengkapi dengan berbagai kebijakan dalam paket-paket deregulasi yang berkaitan dengan investasi asing. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menarik investor dalam menanamkan modalnya untuk berinvestasi di Indonesia guna memenuhi kebutuhan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Investasi dalam negeri yang biasa dikenal dengan istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah bentuk upaya dalam

rangka menambah modal guna menunjang pembangunan nasional maupun wilayah melalui investor dalam negeri. Modal yang diperoleh dari dalam negeri ini dapat berasal dari pihak swasta ataupun dari pemerintah. Undang-undang yang mengatur PMDN di Indonesia pertama kali ditetapkan berdasarkan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang kemudian disempurnakan oleh UU No. 12 Tahun 1970 juga mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri.

4. Teori Tentang Upah

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Undang-undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000).

Upah merupakan balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dsb). Upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu). Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan atau buruh).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa dari para produsen kepada

tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya, peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum regional (UMR), produktivitas marginal tenaga kerja, tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha, dan perbedaan jenis pekerjaan. Jenis-jenis upah dalam berbagai kepustakaan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja menurut Zaeni Asyhadie (Zaeni Asyhadie, 2008:70) dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Upah nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

2. Upah nyata (*Ril Wages*)

Upah nyata adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan tergantung dari: a) besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima; b) besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

3. Upah hidup

Upah hidup, yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.

4. Upah minimum

Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah. Gubernur dengan memerhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota, dan setiap tahun kadangkala berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum, yaitu :

- a. Untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja/buruh sebagai subsistem dalam suatu hubungan kerja.
- b. Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang secara materi kurang memuaskan.
- c. Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan.
- d. Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan.
- e. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara normal.

5. Upah wajar

Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antar upah minimum dan upah hidup sesuai dengan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Kondisi perekonomian Negara.
- b. Nilai upah rata-rata di daerah tempat perusahaan itu berada.
- c. Peraturan perpajakan.
- d. Standar hidup para pekerja/buruh itu sendiri.
- e. Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian Negara.

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.

Dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan bahwa Pemerintah dalam hal ini Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau bupati/walikota, menetapkan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak dan perlindungan pengupahan, penetapan upah minimum dan pengenaan denda terhadap pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaian diatur dengan peraturan pemerintah (Hardijan Rusli, 2011:91)

Upah minimum diarahkan kepada pencapaian KHL yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan Menaker (Menteri Tenaga Kerja). Pencapaian KHL perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh kemampuan dunia usaha, (Hardijan Rusli, 2011:91).

Upah minimum dapat terdiri atas:

1. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
2. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. (Hardijan Rusli, 2011:92).

Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional, dan tidak boleh rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.

Penetapan upah minimum perlu mempertimbangkan beberapa hal secara komprehensif. Dasar pertimbangan menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER01/MEN/1999 sebagai berikut:

1. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).
 - b. Indeks Harga Konsumen (IHK).
 - c. Kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan.
 - d. Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah.
 - e. Kondisi pasar kerja.
 - f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.
2. Untuk penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), di samping mempertimbangkan butir 1 di atas juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan secara sektoral. (Abdul Khakim, 2009 :42).

Terhadap perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP-226/MEN/2000 juga mengaturnya di dalam Pasal 19 ayat (2) yang menentukan “Permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja/Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Propinsi.

Permohonan penangguhan pelaksanaan upah Minimum dimaksud di atas tidaklah serta merta dapat disetujui oleh Gubernur. Di dalam Pasal 20 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP-226/MEN/2000 dinyatakan bahwa “Berdasarkan permohonan penangguhan pelaksanaan upah Minimum, Gubernur dapat meminta akuntan publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan atas biaya perusahaan yang memohon penangguhan.” Selanjutnya Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah Minimum berdasarkan audit dari Akuntan Publik. Apabila permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum disetujui oleh Gubernur, maka persetujuan tersebut berlaku untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Atau dengan kata lain, bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat melakukan penangguhan yang tata caranya diatur dengan keputusan Menaker. Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Bila penangguhan tersebut berakhir, maka

perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu, tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

Dalam kaitannya dengan kesejahteraan para pekerja/buruh. (Albert dan Hahnel dalam Darussalam 2009:77) mengemukakan konsep dalam teori kesejahteraan adalah kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu *classical utilitarian*, (*neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach*). Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah. Berdasarkan pada beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan. Maka dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Kedua, Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur.

Dalam hal ini Thomas dkk. (2009:15) menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah. Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi.

Kondisi 40 tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian

Menurut Suharto (2009:1) pengertian kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. Penjelasan diatas mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada.

B. Tinjauan Empiris

Dalam penelitian ini dikemukakan beberapa fakta fakta yang ada bahwa sektor industri berpengaruh signifikan terhadap tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa kesempatan kerja sektor industri secara nyata dipengaruhi oleh jumlah usaha/industri, angkatan kerja dan kesempatan kerja investasi dan upah.

Rezal Wicaksono (2010) Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Riil, Suku Bunga Riil, dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga kerja Pada Industri Pengolahan Sedang Dan Besar Di Indonesia. Variabel terikat jumlah tenaga kerja yang bekerja industri pengolahan dan variabel bebas PDB industri pengolahan, suku bunga riil, upah riil, dan jumlah unit usaha. Alat analisis yang digunakan *Ordinary Least Square (OLS)* dalam bentuk semi-log. Maka dari itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDB industri dan upah riil berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri pengolahan. Variabel suku bunga riil dan jumlah unit usaha tidak mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industri pengolahan.

Amin Budiawan, (2013) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Industri Kecil Pengolahan Ikan di Kabupaten Demak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: upah, modal, nilai produksi sebagai variabel bebas dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi. Metode analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang ditransformasikan ke logaritma berganda dengan menggunakan logaritma natural (Ln). Hasil penelitian ini menunjukkan Terdapat pengaruh positif antara nilai upah terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak, ada pengaruh positif antara nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak. Modal berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil pengolahan ikan di Kecamatan Demak. Ada pengaruh positif antara nilai upah, nilai produksi dan modal

terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak.

Robby Anggriawan, (2015) Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur (Besar dan Sedang) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011. Variabel yang digunakan adalah Tenaga Kerja, Jumlah Industri, Tingkat Upah, Nilai Output, Biaya Inp. Alat analisis yang digunakan yaitu Analisis data yang dilakukan dengan bantuan metode regresi linier berganda sebagai alat ekonometrika perhitungannya serta digunakan juga metode analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari sebuah sampel ataupun populasi yang teramati. Hasil penelitian ini menunjukkan, jumlah industri memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Provinsi Jawa Timur, upah dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Provinsi Jawa Timur, nilai output berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sector industri manufaktur di Provinsi Jawa Timur, biaya input atau investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerjapada sektor industri Manufaktur di Provinsi Jawa Timur, variabel yang memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Provinsi Jawa Timur adalah jumlah industri dan biaya input karena jika jumlah industri semakin tinggi maka tenaga kerja yang di serap juga semakin tinggi.

Mukhamad Rizal Azaini, (2014) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Malang (Studi Kasus Pada Tahun 1998–2012). Variabel penelitian ini

adalah Variabel terikat jumlah tenaga kerja dan variabel bebas pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan investasi. Alat analisis yang digunakan yaitu Metode yang akan digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif melalui analisis regresi linier berganda metode *Ordinary Least Square* (OLS) yang dianalisis dengan software Eviews 7. Hasil penelitian ini menunjukkan, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan bertanda positif secara parsial dan simultan terhadap penyerapan tenaga kerja, variabel upah minimum berpengaruh signifikan bertanda negatif secara parsial dan simultan terhadap penyerapan tenaga kerja, variabel investasi berpengaruh signifikan bertanda positif secara parsial dan simultan terhadap penyerapan tenaga kerja.

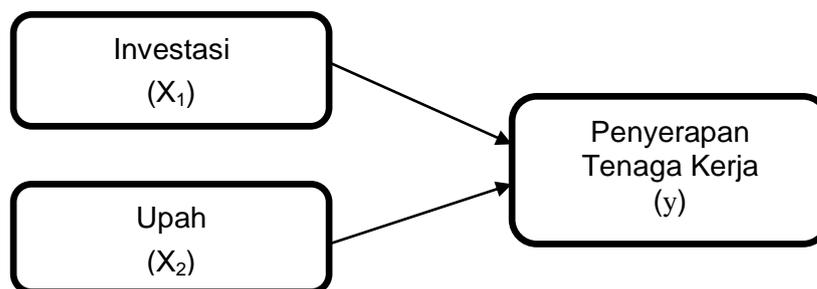
Abdul Karib, (2012) Analisis Pengaruh Produksi, Investasi dan Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Sumatera Barat Variabel terikat permintaan tenaga kerja dan variabel bebas diantaranya adalah produksi (*output*), investasi dan jumlah unit usaha. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi. Metode analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang ditransformasikan ke logaritma berganda dengan menggunakan logaritma natural (Ln). Hasil penelitian ini menunjukkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri Sumatera Barat dipengaruhi oleh variabel nilai produksi nilai investasi dan jumlah unit usaha, nilai produksi, nilai investasi, dan jumlah unit usaha merupakan faktor yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri Sumatera Barat tahun 1997–2008, variabel produksi merupakan faktor yang cukup menentukan terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri Sumatera Barat, variabel produksi memiliki hubungan yang positif dengan

tenaga kerja, variabel investasi merupakan faktor yang cukup menentukan terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri Sumatera Barat, variabel investasi memiliki hubungan yang positif dengan tenaga kerja, variabel jumlah unit usaha merupakan faktor yang sangat menentukan terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri Sumatera.

Romas Yossia Tambun saribu (2013). Analisis Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja, Upah Riil, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Variabel terikat jumlah tenaga kerja dan variabel bebas pertumbuhan ekonomi, upah riil, dan produktivitas tenaga kerja. Analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan metode *Least Square Dummy Variable* (LSDV) yang diolah dengan program Eviews 6.0. Hasil penelitian ini menunjukkan produktivitas tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, upah riil dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja. Dan arah koefisien regresi positif menunjukkan bahwa upah riil dan pertumbuhan ekonomi meningkat dapat menyebabkan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

C. Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel independen yang ingin dilihat yaitu variable x dan variable y dan digambarkan hubungan pengaruh diantara variabel-variabel penelitian ini dalam kerangka pemikiran teoritis yang disajikan pada gambar 2.1 dibawah.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Dalam gambar kerangka pikir diatas terlihat bahwa variable investasi (X_1), upah (X_2) berpengaruh terhadap variable independen penyerapan tenaga (y) yang mana objek penelitiannya yaitu sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi selatan. Pada pembagian variabel di atas, pada tingkat investasi dan upah sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga pada kerja sektor industri pengolahan.

Variabel investasi dianggap mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang diserap pada suatu sektor industri pengolahan karena investasi mempunyai peranan penting bagi setiap usaha karena bagaimanapun juga investasi akan menimbulkan peluang bagi pelaku ekonomi untuk memperluas usahanya serta memperbaiki sarana-sarana produksi, sehingga dapat meningkatkan output yang nantinya dapat memperluas kesempatan kerja. Upah merupakan variabel yang dianggap mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja, karena tingkat upah secara tidak langsung akan memberikan dampak terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja.

D. Hipotesis

Dari perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulius membuat hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012- 2016.
2. Diduga bahwa upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012- 2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yakni kegiatan penelitian dalam usaha pencapaian kesimpulan atas hipotesis yang diajukan dengan melakukan analisis data-data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data-data yang disajikan dalam bentuk angka-angka yang meliputi data time series yaitu data yang disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang di ambil adalah Provinsi Sulawesi Selatan, data yang diambil yaitu data yang berkaitan dengan variabel penelitian seperti data investasi, upah dan penyerapan tenaga kerja yang dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan data terkait dengan penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan sumber-sumber yang terkait dalam kurung waktu 2 bulan yakni bulan April – Juni 2018.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Adapun definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Penyerapan tenaga kerja (y) adalah banyaknya orang yang bekerja pada sektor industri pengolahan.
2. Investasi (X_1) adalah penanaman modal terhadap sektor ekonomi guna

meningkatkan produktivitas sektor-sektor pendukung dalam perekonomian dalam satuan miliar rupiah.

3. Upah (X_2) adalah jumlah pengeluaran untuk pekerja dibagi dengan banyaknya pekerja.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh adalah data dalam bentuk tahunan untuk masing-masing variabel.

E. Teknik Analisis Data

Alat analisis yang akan digunakan dalam pengolahan data penelitian ini menggunakan alat analisis model ekonometrik regresi linear berganda yang nantinya akan di olah dengan bantuan alat analisis statistik SPSS 2.3 Adapun persamaan awal dari model statistik yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

$$Y = f (X_1, X_2)$$

Model tersebut tersebut kemudian diformulasikan untuk menaksir perkiraan dengan persamaan *Regresi Non Linear*, dalam "*Ekonometric Models and Economic Forecast*" sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e.....$$

Dimana:

Y = penyerapan tenaga kerja

a = konstanta

$b_1 b_2$ = Koefisien variabel

x_1 = investasi

x_2 = upah

e = *error term*

1. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear Ordinary Least Square (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik memiliki beberapa bagian yaitu :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas adalah dengan menggunakan metode analisis grafik, baik dengan melihat grafik secara histogram ataupun dengan melihat secara *Normal Probability Plot*. Normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik *Normal Probability Plot* atau dengan melihat histogram dari residualnya.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis grafik.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Salah satu metode analisis untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian nilai Durbin Watson (DW test).

2. Uji Statistika

Uji statistik terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Uji F (simultan)

Uji F digunakan untuk melihat kevalidan model regresi yang digunakan. Dimana nilai F ratio dari koefisien regresi kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel. Dengan kriteria uji, jika $>$ maka H_0 ditolak jika $<$ maka H_0 diterima. Dengan tingkat signifikansi sebesar 10% ($\alpha = 0,1$). Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh total produksi, jumlah industri, investasi terhadap jumlah tenaga kerja.

2. Uji t Statistika

Uji t terhadap koefisien regresi secara parsial dilakukan dengan uji Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Dengan tingkat signifikansi sebesar 10% ($\alpha=0,1$) nilai hitung dari masing-masing koefisien kemudian dibandingkan dengan nilai t table. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dengan prob-sig $\alpha = 10\%$ ($\alpha = 0,01$) berarti bahwa masing-masing variable independen berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen.

3. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Menjelaskan seberapa besar peranan variable independen terhadap variabel dependen, semakin besar semakin besar peranan variabel dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai berkisar antara 0 sampai 1.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan

1. Kondisi Geografis

Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Jazira selatan pulau Sulawesi. Ibu kotanya adalah Makassar, dahulu disebut Ujung Pandang. Provinsi Sulawesi Selatan terletak 0012' – 80 Lintang Selatan dan 116048' – 122036' Bujur Timur. Luas wilayahnya 62.482,54 km² (42% dari luas seluruh Pulau Sulawesi dan 4,1% dari luas seluruh Indonesia). Provinsi ini memiliki posisi yang strategis di kawasan timur Indonesia yang memungkinkan Provinsi ini sebagai pusat pelayanan, baik bagi kawasan timur Indonesia maupun skala Internasional. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores.

Hampir 75 persen wilayah Sulawesi Selatan merupakan daerah daratan tinggi yang memajang ditengah daratan dari utara ke selatan melalui Gunung Rante Mario dan Gunung Ganda Dewata di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara, di wilayah bagian utara hingga Gunung Lompobattang di Kabupaten Bantaeng

daratan rendah/ pantai membentang sepanjang pesisir pantai barat, tengah dan timur dengan total panjang pantai yang dimiliki kurang lebih 2500 km.

Secara administrasi, pada tahun 2009 Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 24 kabupaten/kota yang terdiri dari 21 kabupaten 3 kota, 304 kecamatan dan 2182 desa dan 764 kelurahan. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kawasan industri dengan status BUMN, dengan luas 233,9642 ha. Luas area yang terpakai baru sekitar 82,001871 ha

2. Potensi Sumber Daya

a. Potensi Sumber Daya Alam

Luas kawasan hutan yang merupakan sumber daya hutan menempati 46,76% dari total luas daratan Sulawesi Selatan yang terdiri dari fungsi lindung, fungsi produksi dan fungsi-fungsi khusus. Potensi sumber daya hutan yang ditetapkan sebagai fungsi lindung hanya sebesar 27,13% dari total luas wilayah Sulawesi Selatan tidak proporsional dalam fungsi lindungnya dikaitkan dengan bentang alam Sulawesi Selatan yang dipengaruhi oleh gunung yang membentang dari selatan-utara (Gunung Lompobattang, Bawakaraeng, Latimojong, Balase, Kambuno, Rante Mario, dan Rante Kumbala). Telah terjadi penipisan sumber daya hutan baik dalam fungsi lindungnya maupun fungsi produksinya yang terindikasi pada kondisi kawasan hutan yang hanya 60,27% vegetasi berhutan dan luasnya lahan krisis dalam kawasan hutan (17,9%).

Pemanfaatan sumber daya hutan dalam fungsi produksi (ekonomi) belum memberikan sumbangan yang berarti dalam perekonomian Sulawesi Selatan baik dalam sumbangan langsungnya (0,21% dari total PDRB 2004) maupun dorongannya/dukungannya terhadap industri pengolahan bahan hasil hutan. Telah terjadi penurunan daya dukung sumber daya hutan terhadap lingkungan khususnya terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyebabkan terjadinya erosi/sendimentasi, banjir, longsor pada beberapa lokasi sungai dan bendung/waduk yang menimbulkan *Impact* lebih luas.

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dinilai sangat kritis adalah DAS Jeneberang karena luas kawasan hutan yang tidak proporsional terhadap luas wilayah dengan kondisi vegetasi yang buruk, presentase lahan kritis dalam kawasan hutan yang besar dan pengaruh topografi gunung Lompobattang dan Bawakaraeng yang mengakibatkan DAS Jeneberang rentang terhadap erosi, longsor, banjir dan pendangkalan pada bendung.

b. Potensi Sumber Daya Mineral

Sumber Daya Alam Mineral/Tambang dalam perekonomian Sulawesi Selatan diharapkan mampu memberikan sumbangan yang besar utamanya dalam mendorong dan mendukung berkembangnya sektor industri. Potensi Sumber Daya Mineral keterdapatannya cukup besar berupa gas bumi dan 28 jenis bahan galian potensial yang sebarannya pada 19 kabupaten. Keterdapatan dan ketersebaran galian potensial menyebabkan overlap dengan fungsi-fungsi sumber daya alam lainnya sehingga pemanfaatan potensi tambang/galian rentang terhadap masalah-masalah lingkungan.

Pemanfaatan potensi sumber daya mineral belum optimal karena dipengaruhi oleh pangsa pasar, teknologi dan pertimbangan aspek lingkungan. Namun telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Sulawesi Selatan, dan dukungannya terhadap industri yang memanfaatkan bahan galian bukan logam.

Pemanfaatan potensi tambang/galian meskipun telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Sulawesi Selatan, tetapi sumbangannya terhadap penyerapan tenaga kerja sangat kecil (hanya 0,4% dari total tenaga kerja), yang berarti kurang memberikan dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat. Potensi tambang/galian yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi berpotensi untuk mendorong berkembangnya usaha-usaha, industri, rakyat kecil dan RT dengan teknologi sederhana dan mudah diserap masyarakat. Eksploitasi pertambangan saat ini yang dilakukan dalam kawasan hutan arealnya cukup luas yang memerlukan upaya reklamasi hutan.

c. Potensi Sumber Daya Air

Pemanfaatan potensi tambang/galian meskipun telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Sulawesi Selatan, tetapi sumbangannya terhadap penyerapan tenaga kerja sangat kecil (hanya 0,4% dari total tenaga kerja), yang berarti kurang memberikan dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat. Potensi tambang/galian yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi berpotensi untuk mendorong berkembangnya usaha-usaha, industri, rakyat kecil dan RT dengan teknologi

sederhana dan mudah diserap masyarakat. Eksploitasi pertambangan saat ini yang dilakukan dalam kawasan hutan arealnya cukup luas yang memerlukan upaya reklamasi hutan.

Tingkat volume kendali pemanfaatan sumber daya air melalui reservoir masih sangat kecil dibandingkan dengan volume potensi tersedia, yang dikawatirkan pada musim kemarau suplay air untuk berbagai kebutuhan tidak dapat terpenuhi. Kondisi hutan yang tidak proporsional mendukung daerah aliran sungai (DAS) adalah mempengaruhi kuantitas dan kualitas air sesuai peruntukannya terutama pada DAS Jeneberang.

d. Potensi Sumber Daya Pesisir Laut

Potensi sumber daya pesisir dan laut utamanya sumber daya hayati ikan dan sejenisnya telah dieksploitasi secara berlebihan baik melalui perikanan tangkap (laut) maupun budidaya ikan (tambak), sehingga terjadi penipisan sumber daya baik pesisir maupun laut. Masyarakat pesisir dan laut yang jumlahnya cukup besar dengan ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan sumber daya hayati laut diperhadapkan pada masalah makin terbatasnya dan berkurangnya potensi tangkap yang sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi mereka.

Potensi lahan tambak telah dimanfaatkan hampir sebanding dengan potensi tersedia, sehingga tidak layak lagi dilakukan perluasan areal tambak karena akan berdampak cv 'ekologis dan akan terjadi benturan fungsi-fungsi lahan. Potensi sumber daya pesisir dan laut yang prospektif untuk diolah dan dikembangkan adalah sumber daya potensi parawisata, namun

diperhadapkan pada kompleksitas masalah dalam pengolaan/eksplotasinya. Agar penanganan strategis pembangunan provinsi Sulawesi Selatan atau yang lebih dikenal dengan program *Good Governance* (pemerintahan yang baik) bisa pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan), sektor koperasi dan UKM, Sektor pertambangan dan energi, sektor pendidikan, sektor tenaga kerja, sektor kesehatan, sektor pemukiman, sektor perhubungan dan sektor lainnya. Berbagai peluang investasi khususnya bagi investor local maupun asing cukup tersedia di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya yang berkaitan dengan pertambangan, industri, pertanian, angkutan dan lainnya. terlaksana sesuai yang diharapkan, maka sektor yang menjadi prioritas dalam pembangunan adalah sektor-sektor yang mempunyai hubungan baik secara langsung dengan program dimaksud. Sektor-sektor prioritas antara lain, sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan), sektor koperasi dan UKM, Sektor pertambangan dan energi, sektor pendidikan, sektor tenaga kerja, sektor kesehatan ,sektor pemukiman, sektor perhubungan dan sektor lainnya. Berbagai peluang investasi khususnya bagi investor local maupun asing cukup tersedia di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya yang berkaitan dengan pertambangan, industri, pertanian, angkutan dan lainnya.

3. Peluang Investasi

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki nilai strategis dalam konstalasi pembangunan Indonesia. Selain memiliki sumber daya alam yang cukup besar, khususnya di bidang pertanian,

pertambangan dan pariwisata. Dengan letak strategis di tengah tengah Indonesia dan menjadi pintu gerbang sekaligus berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu Sulawesi Selatan memiliki keunggulan komparatif sekaligus kompetitif untuk kegiatan investasi.

Adapun keunggulan untuk berinvestasi di Sulawesi Selatan yaitu:

- a. Posisi yang strategis secara ekonomi sehingga berperan sebagai pusat pelayanan angkutan udara dan laut di Kawasan Timur Indonesia dan Pusat pelayanan jasa perdagangan, industri serta perbankan.
- b. Wilayah yang relative aman bagi kegiatan investasi di Indonesia, dimana gejolak masyarakat dan komunitas buruh relative rendah.
- c. Keanekaragaman potensi sumber daya alam untuk investasi. Ketersediaan infrastruktur wilayah yang memadai bagi kegiatan investasi.
- d. Kawasan Timur Indonesia sebagai pasar potensial yang belum memanfaatkan secara maksimal.
- e. Komitmen Pemerintah Daerah yang sangat kuat dalam memberikan kemudahan bagi Investor.
- f. Ketersediaan Sumber daya manusia yang berkualitas.
- g. Ketersediaan lahan yang masih luas dan relatif murah.

1) Bidang Pertanian

a. Perkebunan Jagung

Merupakan tanaman pangan yang banyak ditanam petani Sulawesi Selatan akhir-akhir ini karena ekspor yang cukup baik untuk permintaan pakan ternak. Total produksi jagung Sulawesi Selatan

adalah lebih kurang 661.241. ton dengan luas tanam 192.456 ha. Mempertimbangkan luas lahan yang tersedia dan maksimalisasi teknologi, diperkirakan produksi jagung masih dapat dinaikkan hingga 2 kali lipat. Daerah yang potensial untuk daerah komoditi ini terutama adalah Kabupaten Takalar, Bone, Jeneponto, Bulukumba dan Gowa.

b. Perkebunan Kakao

Lebih kurang 70% produk ekspor kakao Indonesia berasal dari Sulawesi Selatan sehingga menjadikan Indonesia sebagai Negara kedua terbesar penghasil kakao dunia setelah Pantai Gading. Oleh karena itu tidak salah jika Sulawesi Selatan disebut sebagai tanah kakao Indonesia. Pada tahun 2005 total produksi kakao adalah 178.426,61 ton dengan luas wilayah perkebunan kakao mencapai 222.566,82 ha. Sampai saat ini kurang dari 10% produksi biji kakao yang diolah di Sulawesi Selatan menjadi "bubuk kakao" sisanya langsung diekspor keluar negeri. Lokasi pengembangn utama komoditi ini adalah Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur.

c. Perkebunan Kopi

Kopi kalosi dan Kopi Toraja merupakan kopi arabika berasal dari Sulawesi Selatan yang telah dikenal di manca negara. Produksi kopi arabika pada tahun 2005 adalah 15,190,64 ton dengan luas tanaman 26.232 hektar. Wilayah perkebunan kopi Arabika terutama di wilayah Kabupaten Enrekang dan Tana Toraja. Kopi Robusta adalah jenis kopi lain yang dikembangkan cukup luas di Sulawesi Selatan, khususnya di

wilayah Kabupaten Tana Toraja, Bulukumba, Sinjai, Pinrang. Total produksi Kopi Robusta di Sulsel pada tahun 2005 adalah 16.692.24 ton dengan luas perkebunan 28.692,78 hektar.

d. Perkebunan Jambu Menté

Sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan sesuai untuk perkebunan Jambu Menté. Khususnya Kabupaten Bone, Pangkep, Sidrap, Barru Bulukumba dan Pinrang. Permintaan ekspor yang semakin baik dari tahun ke tahun menjadikan komoditi ini berkembang dengan pesat. Total produksi Menté tahun 2005 adalah 24.419 ton dengan luas kebun yang umumnya adalah kebun rakyat adalah 68.3146 hektar.

e. Perkebunan Vanili

Terdapat di Kabupaten Wajo, Maritim Selayar, Bulukumba

f. Perkebunan Ubi Kayu

Terdapat hampir semua Kabupaten di Sulawesi Selatan.

g. Tambak Udang

Kegiatan Pertambakan Udang Windu Berorientasi ekspor masih cukup potensial dan diminati investor. Total luas kawasan tambak Udang yang umumnya terkonsentrasi di wilayah pantai barat, khususnya di wilayah Kabupaten Pinrang, Barru dan Pangkep sebesar 98,604 hektar dengan total produksi 12,548 ton.

h. Penangkapan Ikan Laut

Produksi Ikan Laut yang paling besar pada tahun 2004 adalah Ikan Cakalang dengan total tangkapan 25,307,7 ton kemudian Ikan Tuna sebanyak 7,063,4 ton. Hasil non ikan lainnya adalah sebanyak 1,052,5 ton dan Kepiting 457,6 ton.

i. Budidaya Rumput Laut

Memanfaatkan garis pantai sepanjang 2500 km merupakan peluang budidaya rumput laut di Sulawesi Selatan. Pada Tahun 2004, total produksi rumput laut adalah kurang lebih 4,642,7 ton yang berasal dari budi daya tambak dan laut di perairan Kabupaten Takalar, Jeneponto, Luwu, dan Wajo.

j. Penggemukan Sapi

Merupakan komoditi sektor peternakan yang berkembang untuk memenuhi permintaan local dan diantar pulaukan dari Sulawesi Selatan. Penghasil terbesar sektor ini adalah kabupaten Gowa, Sidrap, Pinrang, pare-pare dan Enrekang.

2) Bidang Industri

Terdiri dari industri Keramik/Marmer, industri Pengelolaan Kakao (*powder/butter*), Industri Semen, Industri Pakan Ternak, Industri sutra, Industri Pengelolaan Kopi, Industri Pengelolaan Kayu, Industri Pengelolaan Buah-Buahan, Industri Pengalengan Ikan dan Hasil Laut, Industri Kapal dan Industri Pengolahan.

3) Bidang Pertambangan dan Energi

Investasi menarik di bidang pertambangan dan energi mencakup penambangan pasir besi di Kabupaten Takalar, Maritim Selayar dan Jeneponto, granit di Kabupaten Maritim Selayar, Luwu Utara; marmar di Kabupaten Maros, Bone, Luwu, Pangkep, Barru, dan Enrekang; pasir silika (kuarsa) di Kabupaten Soppeng, Enrekang, Sidrap, Pinrang, Bone, dan Maros; Batu bara di Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Sidrap, Enrekang, Bone dan Sinjai; Pembangkit tenaga Listrik terdapat di Kabupaten Bulukumba, Maritim Selayar dan Pinrang.

4) Bidang Parawisata

- a) Pengembangan Kawasan Wisata/Resort
- b) Pengembangan Transportasi Wisata Laut, diantaranya terdapat di Kabupaten Pangkep (P. Kapoposan), sinjai (P. Sembilan) dan Maritim Selayar (Takabonerate)
- c) Pengembangan Usaha penunjang Wisata Laut
- d) Pembangunan Gedung Pertemuan/Pameran
- e) Pembangunan Perhotelan di Tana Toraja, Makassar, Bira
- f) Pengembangan Pulau-pulau Kecil di depan Sektor Industri di Provinsi Sulawesi Selatan untuk wisata
- g) Pengembangan Wisata Bahari dan Agrowisata

Investasi di bidang pariwisata mencakup pengembangan kawasan wisata/resort; Pengembangan transportasi wisata laut di antaranya di Kabupaten Pangkep (P. Kapoposan), Sinjai (P. Sembilan) dan Maritim

Selayar (Takabonerate); pengembangan usaha penunjang wisata laut; pembangunan gedung pertemuan/pameran; pembangunan perhotelan di Tana Toraja, Makassar dan Bira; pengembangan pulau-pulau kecil di depan Sektor Industri di Provinsi Sulawesi Selatan; dan pengembangan wisata bahari dan agrowisata.

5) Bidang Jasa dan Perdagangan

Di bidang jasa dan perdagangan, investasi bisa dikucurkan untuk pembangunan gedung perkantoran, pusat bisnis dan perdagangan, jasa ekspor/impor, perbankan dan pergudangan. Realisasi investasi di Sulawesi Selatan pada 2005 meningkat cukup signifikan. Untuk PMDN di tahun itu terdapat lima investor. Dilihat dari nilai investasi PMDN, untuk provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan ke-11 dari 33 provinsi di Indonesia dengan total investasi sebesar Rp. 473,7 miliar, Sedangkan untuk PMA, pada 2005 terdapat satu investor asing. Provinsi ini menduduki urutan ke-13 dari 33 provinsi di Indonesia yang menerima kucuran dana asing dengan nilai investasi US \$ 67,1 juta.

Struktur geologi batuan di Propinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik geologi yang dicirikan oleh adanya berbagai jenis satuan batuan yang bervariasi. Struktur dan formasi geologi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari volkan tersier, Sebaran formasi volkan tersier ini relatif luas mulai dari Cenrana sampai perbatasan Mamuju, daerah Pegunungan Salapati (Quarles) sampai Pegunungan Molegraf, Pegunungan Perombengan sampai Palopo, dari Makale sampai utara Enrekang, di sekitar Sungai Mamasa, Sinjai sampai

Tanjung Pattiro, di deretan pegunungan sebelah barat dan timur Ujung Lamuru sampai Bukit Matinggi. Batuan volkan kwarter, Formasi batuan ini ditemukan di sekitar Limbong (Luwu Utara), sekitar Gunung Karua (Tana Toraja) dan di Gunung Lompobatang (Gowa). Kapur kerang terdapat di sebelah barat memanjang antara Enrekang sampai Rantepao, utara Parepare, di Pegunungan Bone Utara sebelah barat Watampone, bagian barat Pulau Selayar, dan di Tanjung Bira (Bulukumba). Alluvium kwarter, dijumpai di dataran sepanjang lembah sungai antara Sungai Saddang dan Danau Tempe, Sungai Cenrana di dataran antara Takalar – Sumpang Binangae (Barru), di selatan Parepare, di dataran Palopo – Malili, di selatan Palopo sampai Umpu, di sekitar Sinjai serta di Rantepao (Tana Toraja) dan Camba (Maros).

Pegunungan Latimojong, di sebelah tenggara Barru dan di Bukit Tanjung Kerambu di Kabupaten Pangkep. Batuan sedimen mesozoikum, formasi ini ditemukan di daerah Tana Toraja (Pegunungan Kambung dan di sebelah barat Masamba) batuan terdiri dari serpih, napal, batu tulis, batu pasir, konglomerat yang umumnya berwarna merah, ungu, biru, dan hijau. Batuan plutonik basa, dijumpai di bagian timur Malili dan tersebar sebagai intrusi antara lain di bagian utara Palopo, di Gunung Maliowo dan Gunung Karambon. Batuan plutonik masam, ditemukan di sekitar Sungai Mamasa, sedangkan granodiorit dijumpai di barat laut Sasak. Di antara Masamba dan Leboni. Batuan sediment paleogen, Tersebar di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu di bagian timur Pangkajene sampai di timur Maros, memanjang di bagian timur lembah Walane dan di tenggara Sungai Sumpatu. Batuan sedimen neogen, penyebarannya

di sekitar Lodong, sebelah timur Masamba memanjang dari utara Enrekang sampai Pompanua, dari Sengkang ke tenggara sampai Rarek dan ke selatan sampai Sinjai, di Pulau Selayar bagian timur dan di selatan Sinjai sampai Kajang.

4. Kondisi Klimatologi

Provinsi Sulawesi Selatan terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dimana musim hujan bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. November sampai Maret angin bertiup sangat banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudera Pasifik sehingga pada bulan-bulan tersebut sering terjadi musim hujan. Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut Oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim, yaitu : Tipe iklim A termasuk kategori iklim sangat basah dimana curah hujan rata-rata 3500-4000 mm/tahun.

Wilayah yang termasuk ke dalam tipe ini adalah Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur. Tipe Iklim B, termasuk iklim basah dimana Curah hujan rata-rata 3000 – 3500 mm/tahun. Wilayah tipe ini terbagi 2 tipe yaitu (B1) meliputi Kabupaten Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Tipe B2 meliputi Gowa, Bulukumba, dan Bantaeng. Tipe iklim C termasuk iklim agak basah dimana Curah hujan rata-rata 2500 – 3000 mm/tahun. Tipe iklim C terbagi 3 yaitu Iklim tipe C1 meliputi Kabupaten Wajo, Luwu, dan Tana Toraja. Iklim C2 meliputi Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Barru, Pangkep, Enrekang, Maros dan Jeneponto. Sedangkan tipe iklim C3 terdiri dari Makassar, Bulukumba, Jeneponto, Pangkep, Barru, Maros, Sinjai, Gowa, Enrekang, Tana Toraja,

Parepare, Selayar. Tipe iklim D dengan Curah hujan rata-rata 2000 – 2500 mm/tahun. Tipe iklim ini terbagi 3 yaitu Wilayah yang masuk ke dalam iklim D1 meliputi Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Luwu, Tana Toraja, dan Enrekang. Wilayah yang termasuk ke dalam iklim D2 terdiri dari Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Sinjai, Luwu, Enrekang, dan Maros. Wilayah yang termasuk iklim D3 meliputi Kabupaten Bulukumba, Gowa, Pangkep, Jeneponto, Takalar, Sinjai dan Kota Makassar. Tipe iklim E dengan Curah hujan rata-rata antara 1500 – 2000 mm/tahun dimana tipe iklim ini disebut sebagai tipe iklim kering. Tipe iklim E1 terdapat di Kabupaten Maros, Bone dan Enrekang. Tipe iklim E2 terdapat di Kabupaten Maros, Bantaeng, dan Selayar.

B. Perkembangan Investasi, Upah, dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan

1. Perkembangan Investasi di Provinsi Sulawesi Selatan

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi merupakan bagian dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya bersifat infrastruktur atau prasarana yaitu bangunan fisik atau lembaga yang memiliki fungsi yang esensial sebagai pembuka peluang dan pendukung kegiatan-kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan lain dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Sedangkan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang umumnya langsung menghasilkan barang

dan jasa untuk memenuhi permintaan konsumen, baik perumahan, rumah tangga, maupun industri. Investasi merupakan salah satu faktor yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi, karena selain akan mendorong kenaikan output secara signifikan, investasi juga akan meningkatkan permintaan input yang salah satunya adalah tenaga kerja, sehingga akan mempengaruhi pada penyediaan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja pun tinggi, akhirnya kesejahteraan masyarakat tercapai sebagai akibat dari peningkatannya pendapatan yang diterima masyarakat.

Tabel 4.1
Perkembangan Investasi di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2012-2016

| Tahun | Investasi (Rupiah) |
|--------------|---------------------------|
| 2012 | 2.318.863.400 |
| 2013 | 1.521.017.000 |
| 2014 | 4.949.548.000 |
| 2015 | 9.215.326.600 |
| 2016 | 9.448.673.100 |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2018

Jika dicermati, berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik yang disajikan dalam tabel 4.1, investasi di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2012-2016) memiliki kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah investasi sebesar Rp 2,3 miliar meningkat menjadi Rp 9,4 miliar pada tahun 2016. Peningkatan tersebut memberikan indikasi bahwa telah terjadi perbaikan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Sulawesi Selatan seperti kemudahan dalam perizinan investasi, perbaikan infrastruktur, serta

perbaiki birokrasi. Selain itu, investasi di Provinsi Sulawesi Selatan tertinggi pada industri mineral non logam dan industri makanan.

2. Perkembangan Upah di Provinsi Sulawesi Selatan

Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah Minimum Regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu, Upah mempunyai kedudukan yang strategis bagi tenaga kerja, perusahaan dan bagi pemerintah. Bagi tenaga kerja itu upah digunakan untuk menghidupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, sedangkan bagi perusahaan upah salah satu sumber biaya dalam menentukan dan mempengaruhi produksi total perusahaan itu sendiri dan harga dari output suatu barang, sedangkan bagi pemerintah upah di gunakan untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Jika dicermati, berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik yang disajikan dalam tabel 4.2, Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2012-2016) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 4.2
Perkembangan Upah di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2012-2016

| Tahun | Upah Minimum Regional | |
|-------|--------------------------|---------------------------|
| | UMR Per hari (Rupiah) | UMP Per bulan (Rupiah) |
| 2012 | 48.000 | 1.200.000 |
| 2013 | 57.600 | 1.440.000 |
| 2014 | 72.000 | 1.800.000 |
| 2015 | 80.000 | 2.000.000 |
| 2016 | 90.000 | 2.250.000 |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2018

Pada tahun 2012 UMR per hari sebesar Rp. 48.000 dan UMR per bulan Rp. 1.200.000 meningkat pada tahun 2016, UMR per hari Rp. 90.000, UMR per bulan Rp. 2.250.000. Peningkatan tersebut memberikan indikasi telah terjadi perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan upah diharapkan akan berdampak terhadap perbaikan daya beli masyarakat, sehingga konsumsi masyarakat meningkat dan pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan aktivitas perekonomian di daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri

Sektor industri merupakan sektor yang juga sangat berperan dalam pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor industri juga memegang peranan penting sebagai faktor produktif dalam memaksimalkan pembangunan. Perkembangan sektor industri tidak hanya ditandai dari perkembangan volume produksi, melainkan juga oleh makin

beranekaragamnya jenis produk yang dihasilkan serta mutu yang semakin meningkat. Sektor industri juga berperan dalam meningkatkan lapangan pekerjaan yang luas sehingga menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

Jika dicermati, penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir (2012-2016) mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 tenaga kerja yang terserap pada sektor industri sebesar 3.351.908 jiwa meningkat menjadi 3.694.712 jiwa. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2013 yaitu 3.291.280 jiwa.

Tabel 4.3
Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pegolahan
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2016

| Tahun | Penyerapan Tenaga Kerja (Jiwa) |
|--------------|---------------------------------------|
| 2012 | 3.351.908 |
| 2013 | 3.291.280 |
| 2014 | 3.527.036 |
| 2015 | 3.620.123 |
| 2016 | 3.694.712 |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2018

Penurunan tersebut diakibatkan sektor industri yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan lebih banyak menggunakan padat modal. Selain itu, investasi pada tahun yang sama juga mengalami penurunan sehingga ini diyakini berdampak terhadap turunnya penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2013-2016, penyerapan tenaga kerja secara konsisten telah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut diakibatkan karena kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif

yang berdampak terhadap peningkatan investasi dan pada gilirannya akan berdampak pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor industri.

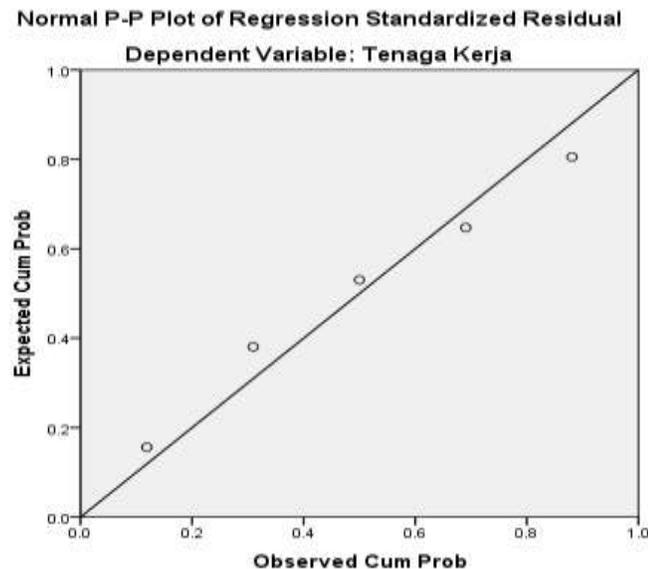
C. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji analisis asumsi klasik merupakan salah satu syarat dalam menggunakan analisis regresi linear berganda. Adapun pengujiannya dapat dibagi dalam beberapa tahap pengujian yang dapat dilihat pada pengujian berikut ini:

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik dengan memiliki distribusi data normal atau mendekati normal dan metode untuk mengetahui normal atau tidaknya adalah dengan menggunakan metode analisis grafik secara histogram ataupun dengan melihat secara *Normal Probability Plot*. Normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal

Berdasarkan tampilan grafik histogram, dapat disimpulkan bahwa variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Berdasarkan dari histogram di atas, menunjukkan pola regresi normal yang memenuhi asumsi normalitas karena histogram yang ada menyerupai lonceng (mendekati pola distribusi normal).



Sumber: SPSS 21 (data diolah)

Gambar 4.1 Grafik Normal P-Plot

Pada gambar 4.1 Normal *Probability Plot* di atas menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dan menunjukkan pola distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi dan layak dipakai untuk memprediksi pembangunan ekonomi berdasarkan variabel bebasnya.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel Independen. Berdasarkan aturan *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance*, maka apabila VIF melebihi angka 10 atau *tolerance* kurang dari 0,10 maka dinyatakan terjadi gejala multikolenieritas. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10 atau *tolerance* lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolnearitas. Adapun hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|-----------|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | Investasi | .205 | 4.876 |
| | Upah | .205 | 4.876 |

Sumber: SPSS 21 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS versi 21 seperti yang tersaji dalam tabel 4.1, diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel independen yaitu nilai VIF Investasi adalah 4,876, dan VIF UMR adalah 4.876. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah multikolinearitas antara variabel independen yakni variabel jumlah penduduk, tenaga kerja, rasio jenis kelamin, dan rasio beban tanggungan bebas dari multikolinearitas yang ditunjukkan dengan nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10.dapat diabaikan karena VIF berada di antara 0,10 dengan 10.

3. Hasil Uji Autokorelasi

Salah satu metode analisis untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan melakukan pengujian nilai durbin watson (DW test). Berdasarkan hasil pengolahan SPSS, di peroleh hasil uji autokorelasi:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .994 ^a | .988 | .976 | .00769 | 2.642 |

Sumber: SPSS 21 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS 21 seperti yang disajikan pada tabel 4.5, diperoleh nilai Durbin Watson (DW) 2,642. Karena nilai durbin watson berada diantara (2,46-2,90), sehingga bisa diartikan tidak ada kesimpulan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasan (2001), bahwa jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Oleh karena itu, Klasifikasi nilai dw yang dapat digunakan untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi.

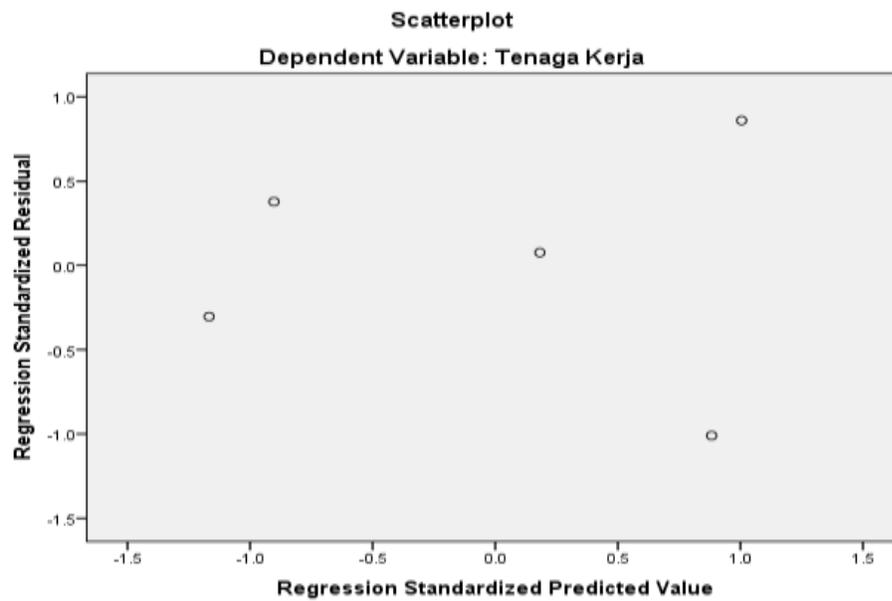
Tabel 4.6
Klasifikasi Nilai DW untuk Autokorelasi

| Nilai | Keterangan |
|---|--|
| <1,10 1,10 – 1,54 1,55 – 2,45 2,46 – 2,90 >2,91 | Ada Autokorelasi Tidak Ada Kesimpulan Tidak Ada Autokorelasi Tidak Ada Kesimpulan Ada Autokorelasi |

Sumber: Iqbal Hasan (2001)

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan SPSS 21.



Sumber: SPSS 21 (data diolah)

Gambar 4.2 Grafik Scatterplot

Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Dari grafik scatter plot menunjukkan bahwa data penyebaran berada di atas nol dan di bawah nol tidak terdapat pola yang jelas, maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

D. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah ditetapkan diterima atau ditolak secara statistik. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan uji F, uji R square, dan uji t. Hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F merupakan uji secara simultan atau secara bersama-sama untuk mengetahui apakah variable Investasi dan Upah secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil analisis dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Simultan (Uji-F)

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | .010 | 2 | .005 | 81.438 | .012 ^b |
| | Residual | .000 | 2 | .000 | | |
| | Total | .010 | 4 | | | |

a. Dependent Variable: Tenaga Kerja

b. Predictors: (Constant), Upah, Investasi

Sumber: SPSS 21 (data diolah)

Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai F hitung sebesar 81.438 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,012, dengan demikian nilai P (sig) = 0,012 < α 0,005. Dengan demikian secara serentak dapat disimpulkan variabel investasi (X1), dan upah (X2), berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y).

2. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variable bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Secara sederhana Koefisien Determinasi dihitung dengan mengkuadratkan Koefisien Korelasi (R).

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .994 ^a | .988 | .976 | .00769 |

a. Predictors: (Constant), Investasi, Upah

b. Dependent Variable: Tenaga Kerja

Sumber: SPSS 21 (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, diperoleh hasil bahwa nilai *adjusted* R^2 sebesar 0,976, hal ini berarti 97,6% variasi penyerapan tenaga kerja, dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen, investasi (X1), dan upah (X2). Sedangkan sisanya sebesar 2,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model.

3. Uji Partial (Uji T)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Sementara itu secara parsial pengaruh dari kedua variabel independen tersebut (Investasi dan Upah) terhadap variabel Y (Penyerapan Tenaga Kerja) pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Hasil Uji Partial (Uji T)

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 13.407 | .294 | | 45.527 | .000 |
| 1 Investasi | .048 | .010 | .803 | 4.670 | .043 |
| Upah | .041 | .034 | .209 | 1.215 | .348 |

a. Dependent Variable: Tenaga Kerja

Berdasarkan tabel 4.9 dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = 13.407 + 0.048 X_1 + 0.041 X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas, diperoleh koefisien regresi investasi (X_1) sebesar 0,048. Koefisien tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara investasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Setiap peningkatan investasi pada sektor industri sebesar 1 persen akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri sebesar 0,048 persen, begitupun sebaliknya setiap penurunan investasi pada sektor industri sebesar 1 persen akan menurunkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri sebesar 0,048 persen. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,043 < 0,05$), maka variabel investasi (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri. Ini juga dibuktikan dari hasil uji t dimana $t \text{ hitung} > t \text{ table}$ ($4.670 > 2,353$).

Koefisien regresi variabel upah (X_2) sebesar 0,041, koefisien tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara upah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri. Setiap peningkatan upah sebesar 1 persen akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,041 persen, begitupun sebaliknya setiap penurunan upah sebesar 1 persen akan menurunkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri sebesar 0,041 persen. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 5% dan 10% ($0,348 > 0,05$), maka variabel

upah (X_2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Ini juga dibuktikan dari hasil uji t dimana $t_{hitung} < t_{table}$ ($1,215 < 2,353$).

E. Pembahasan

1. Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS yang disajikan dalam tabel 4.9, variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Peningkatan investasi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, begitupun sebaliknya penurunan investasi akan menurunkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri, dengan demikian hipotesis awal yang diajukan diterima.

Hasil perhitungan regresi tersebut telah menunjukkan konsistensi terhadap teori yang dikemukakan oleh Keynes, bahwa investasi dengan penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang positif yaitu semakin tinggi investasi maka semakin tinggi pula penyerapan tenaga kerja. Hasil analisis di atas menunjukkan hubungan yang positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini disebabkan karena tingginya investasi membuat perusahaan akan membuat perusahaan menambah tenaga kerjanya sehingga memperoleh output yang lebih tinggi.

Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nununk Nuswantoro dalam hasil penelitiannya bahwa investasi memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan. Selain itu investasi yang tinggi, adakalanya

digunakan oleh perusahaan untuk mengganti alat-alat produksi yang lama seperti mesin-mesin, dan alat teknologi lainnya yang tidak dapat digunakan lagi, sehingga penggantian ini akan menyebabkan penambahan jumlah tenaga kerja ahli di alat-alat produksi tersebut.

2. Pengaruh Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS yang disajikan dalam tabel 4.9, variabel upah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri. Peningkatan upah akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, begitupun sebaliknya penurunan upah akan menurunkan penyerapan tenaga kerja dengan demikian hipotesis awal yang diajukan ditolak. Hasil perhitungan regresi tersebut telah menunjukkan konsistensi terhadap teori yang mengatakan bahwa upah memiliki hubungan yang positif yaitu semakin tinggi upah maka semakin tinggi penyerapan tenaga kerja. Hal ini didasarkan bahwa, tingginya upah akan meningkatkan penawaran tenaga kerja yang dilakukan oleh rumah tangga, hal ini sebagai akibat dari respon masyarakat yang ditunjukkan ketertarikan akan upah yang tinggi yang sehingga akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja yang pada gilirannya akan berdampak terhadap tingginya kesempatan kerja.

Faktanya di Provinsi Sulawesi Selatan, upah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan, hal ini dikarenakan tingginya upah akan berdampak terhadap tingginya penawaran tenaga kerja oleh rumah tangga, akan tetapi

peningkatan tersebut direspon oleh perusahaan dengan menurunkan permintaan tenaga kerja dengan alasan rendahnya profit yang akan diterima perusahaan jika meningkatkan permintaan tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga dalam hal ini masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Sulawesi Selatan. Setiap peningkatan investasi sebesar 1 persen akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,04 persen. Begitupun sebaliknya setiap penurunan investasi sebesar 1 persen akan menurunkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,04 persen.
2. Variabel upah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya setiap peningkatan dan penurunan upah tidak berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan investasi di provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada sektor industri, sebaliknya pemerintah membuat suatu terobosan percepatan pembangunan sarana dan prasarana bagi para investor.
2. Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sebaiknya pemerintah memperhatikan faktor-faktor penting yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor industri, termasuk investasi dan penetapan UMP di Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriawan, R. 2015. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur (Besar dan Sedang) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011*. Jawa Timur.
- Azaini, R, M. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Upah Minimum dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Malang*. Malang.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2016. *Sulawesi Selatan Dalam Angka Berbagai Edisi*. Sulawesi Selatan:BPS.
- Darling. 2008. *Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1996-2006*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Dipublikasikan.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Fretes Pieter N. De. 2007. *Analisis tentang Pengaruh Investasi Terhadap Pembangunan Ekonomi di Provinsi Papua*. Jurnal Aplikasi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow dan Geisler Serui Papua.
- Gilarso. 2003. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jhingan, L. M. 2000. *Ekonomi Pembangunan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mankiw, Gregory N. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi, Subari. 2000. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nanga, Muana. 2005. *Makro ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi. 2009. *Pekerja Sosial di Dunia Industri*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, Sony. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Suprianto, J. 2001. *Statistik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran*. Cetakan Pertama. Jakarta : LPFE-UI.
- Tambun, Y, R, 2013. *Analisis Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja Upah Riiil dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah*. Jawa Tengah.
- Tajuddin, Noer Effendi. 1995. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja, dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Trans. Haris Munandar. Jakarta. Erlangga.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Data Regresi Investasi dan Upah Terhadap Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2016

| Tahun | Investasi (Rupiah) | Upah (Rupiah) | Tenaga Kerja (Jiwa) |
|-------|--------------------|---------------|---------------------|
| 2012 | 2.318.863.400 | 1.200.000 | 3.351.908 |
| 2013 | 1.521.017.000 | 1.440.000 | 3.291.280 |
| 2014 | 4.949.548.000 | 1.800.000 | 3.527.036 |
| 2015 | 9.215.326.600 | 2.000.000 | 3.620.123 |
| 2016 | 9.448.673.100 | 2.250.000 | 3.694.712 |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 (data diolah)

Lampiran 2.

Data Regresi Logaritma Natural (ln) Investasi dan Upah Terhadap Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2016

| Tahun | Investasi | Upah | Tenaga Kerja |
|-------|-----------|----------|--------------|
| 2012 | 21.56434 | 13.99783 | 15.02504029 |
| 2013 | 21.14265 | 14.18015 | 15.0067871 |
| 2014 | 22.32256 | 14.4033 | 15.07596842 |
| 2015 | 22.94413 | 14.50866 | 15.10201856 |
| 2016 | 22.96914 | 14.62644 | 15.12241317 |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 (data diolah)

Lampiran 3.

Koefisien Determinasi (R^2)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .994 ^a | .988 | .976 | .00769 | 2.642 |

a. Predictors: (Constant), Upah, Investasi

b. Dependent Variable: Tenaga Kerja

Lampiran 4.

Uji F Statistik

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | .010 | 2 | .005 | 81.438 | .012 ^b |
| | Residual | .000 | 2 | .000 | | |
| | Total | .010 | 4 | | | |

a. Dependent Variable: Tenaga Kerja

b. Predictors: (Constant), Upah, Investasi

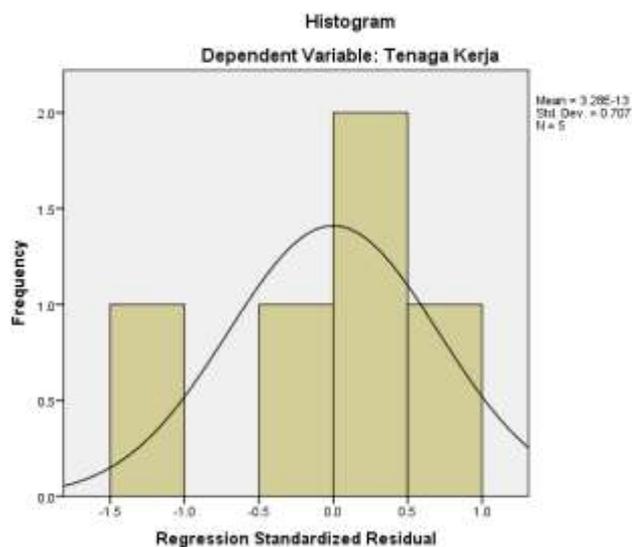
Lampiran 5.

Uji T Statistik

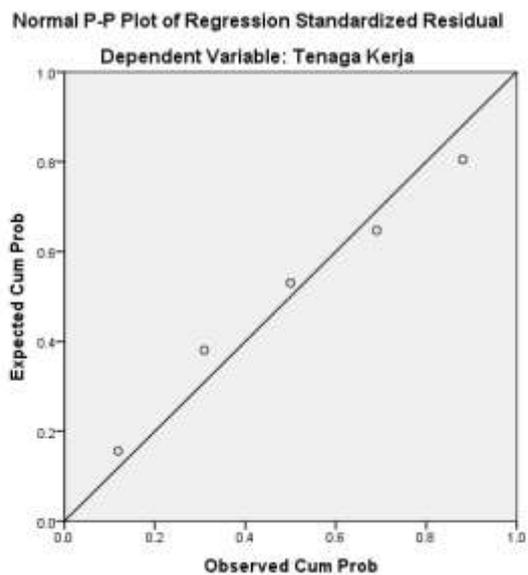
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 13.407 | .294 | | 45.527 | .000 |
| | Investasi | .048 | .010 | .803 | 4.670 | .043 |
| | Upah | .041 | .034 | .209 | 1.215 | .348 |

a. Dependent Variable: Tenaga Kerja

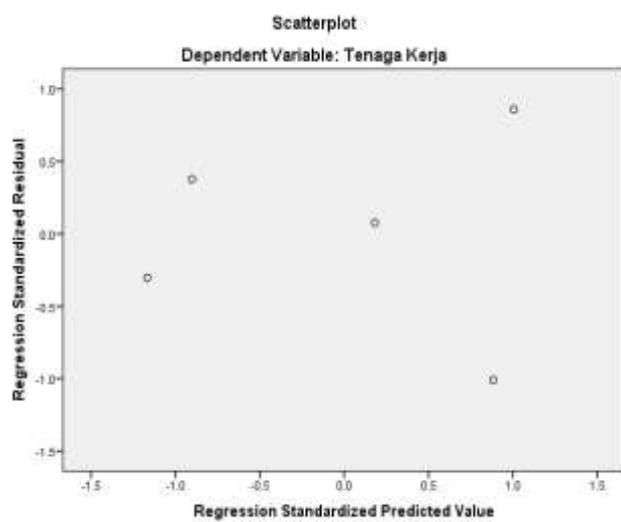
Lampiran 6.



Lampiran 7.



Lampiran 8.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1176/Izn-5/C.4-VIII/V/37/2018

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

13 Ramadhan 1439 H

28 May 2018 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 013/05/C.4-II/V/39/2018 tanggal 25 Mei 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **AKBAR FATUR RAHMAN**

No. Stambuk : **10571 02011 14**

Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Jurusan : **IESP**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Pengaruh Investasi dan Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 2 Juni 2018 s/d 2 Agustus 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
No. 68/05/A4-II/XII/39/2017**

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIV. MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Universitas Muhammadiyah Makassar, setelah :

- Menimbang : 1. Untuk tertib administrasi dalam penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa dilingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unismuh Makassar dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan untuk dosen pembimbing.
2. Untuk maksud diatas, maka perlu diatur dalam satu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar 2001
3. Peraturan yang berlaku di lingkungan Univ. Muhammadiyah Makassar
- Memperhatikan : Usulan Kaprodi IESP, pada tanggal 04 Desember 2017 M.
Dengan memohon inayah Allah Swt,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa:
- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| Nama | : Akbar Fatur Rahman |
| Stambuk | : 105710201114 |
| Program Studi | : IESP |
| Pembimbing I | : Dr. Buyung Romadhoni, SE, M.Si |
| Pembimbing II | : Asdar, SE., M. Si |

Judul Skripsi : Analisis Peranan Sektor Industri Manufaktur Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2016

- Kedua : Seluruh pembiayaan menyangkut dosen pembimbing dan penguji dibebankan berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan Unismuh Makassar.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah yudisium mahasiswa yang bersangkutan.
- Keempat : Surat keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 04 Desember 2017



Tembusan :

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Kaprodi di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
3. Masing-masing mahasiswa



Makassar, 18 Juli 2018

Nomor : B-145/BPS/7300/560/07/2018
Lampiran : -
Perihal : Bukti Penelitian

Kepada Yth,
Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah
di-
Makassar

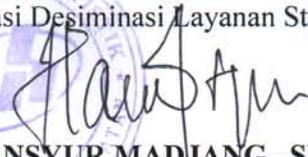
Sehubungan dengan surat dari Dinas Penanaman Modal Satu Pintu nomor : **7449/S.01/PTSP/2018** tanggal 7 Juni 2018, perihal Izin Penelitian maka disampaikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

N a m a : AKBAR FATUR RAHMAN
No. Stambuk : 105710201114
Program Studi : IESP

Benar telah mengambil data di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul : **ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN UPAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DI PROPINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2012-2016**”

Demikian penyampaian kami untuk dipergunakan seperlunya.

An.Kepala BPS Propinsi Sulawesi Selatan
Kasi Desiminasi Layanan Statistik


MANSYUR MADJANG, SE. M.Si

NIP: 196906241989021001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 7449/S.01/PTSP/2018
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Kepala Badan Pusat Statistik Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1176/lzn-05/C.4-VIII/V/37/2018 tanggal 28 Mei 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **AKBAR FATUR RAHMAN**
Nomor Pokok : 105710201114
Program Studi : IESP
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN UPAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2012-2016 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 Juni s/d 02 Agustus 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 07 Juni 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

BIOGRAFI PENULIS



Akbar Fatur Rahman lahir di Soppeng pada tanggal 27 April 1996 sebagai anak Pertama dari pasangan Bapak Muhammad Amir dan Ibu Hj. Jumarni Peneliti sekarang bertempat tinggal di BTN Hamzi Blok A no. 16 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Penulis telah menempuh pendidikan sebagai berikut. Penulis masuk di SD 47 Lamarung dan lulus tahun 2008, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Marioriawa dan lulus tahun 2011. Setelah lulus dari SMP kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan tingkat lanjutan di SMA Negeri 1 Marioriawa lulus tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar program Strata Satu sampai sekarang. Sebagai tugas akhir, maka penulis menulis sebuah skripsi yang berjudul "Analisis Pengaruh Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016.